KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BURT DPR studi banding ke Jerman
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

:: PENATAAN KAWASAN PARLEMEN

BURT DPR Akan Studi Banding ke Jerman

JAKARTA – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berencana melakukan kunjungan kerja ke Berlin, Jerman, pada akhir September mendatang. Agenda studi banding tersebut terkait rencana proyek penataan kawasan parlemen yang akan dimulai pada 2018.

Kunjungan kerja (kunker) selama sepekan ini akan dilakukan oleh 15 anggota BURT DPR. Namun, rencana ini langsung menuai kritik karena urgensinya dipertanyakan. DPR dinilai perlu terbuka ke publik mengenai maksud dan manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan kunker tersebut.

"Ke Berlin, Jerman, untuk melihat bagaimana penataan parlemen disana. Penataan, pelayanan gedungnya, kenyamanan gedung, pelayanan kepada tamu yang datang, keamanannya, dan fasilitasnya," ujar Wakil Ketua BURT Hazrul Azwar, kemarin.

Menurutnya kunker tersebut sudah direncanakan sejak setahun lalu. Adapun momennya bersamaan dengan rencana DPR melakukan pembangunan gedung baru itu disebutnya hanya kebetulan semata. "Jadi lebih seksi gara-gara ada rencana pembangunan gedung," ujarnya.

Proyek penataan kawasan parlemen meliputi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I, pembangunan alun-alun demokrasi, museum, dan perpustakaan. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Ketua BURT Anton Sihombing menyebut kunker BURT akan dilakukan pada 25 September. Dia menolak menjelaskan secara rinci agenda selama di Berlin, tapi dia menjamin itu tidak berkaitan dengan gedung baru DPR karena itu urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR. Dia menyebut dalam setahun anggota DPR mendapat jatah kunker dua kali.

"*Kan* dua kali setahun kunker, nanti saya kasih tahu apa yang dikerjakan," ujarnya.

Mengenai kritikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengingatkan DPR agar mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak proyek pembangunan gedung, Anton menegaskan, dirinya sebagai wakil rakyat sangat memahami gedung tempat kerja anggota DPR saat ini sudah tidak layak kondisinya sehingga ada mandat memperbaikinya.

"Persoalannya karena butuh, masa kalian *nggak* malu gedung sudah begitu, gedung (baru) bukan untuk kami, tapi untuk DPR berikutnya," ujarnya.

Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengatakan setiap rencana kunker DPR selalu terkesan ditutup-tutupi. Padahal sebelum studi banding ada baiknya DPR membuka konsultasi publik untuk mencari masukan.

Hanafi mengatakan, banyak lembaga terkait di dalam negeri yang bisa memberi masukan kepada DPR mengenai pembangunan parlemen modern. BURT dinilai tidak pernah memberikan penjelasan atau menunjukkan dokumen yang memadai terkait rencana kunker ke Jerman. Dengan begitu wajar jika muncul spekulasi publik dan mengaitkan kunker tersebut dengan hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kunker.

"Menurut saya, kalau memang mau kunker, tunjukkan kepada publik tingkat urgensinya secara terbuka. Lalu berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi *input* supaya indikator representatif dalam visi parlemen modern tidak hanya sekadar jargon," ujarnya.

● **kiswondari**